BAB III

UPAYA ILO DALAM MENANGGULANGI KASUS PEKERJA ANAK DI THAILAND

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai upaya ilo dalam menanggulangi kasus pekerja anak di Thailand.dimana dalam bab tiga ini dibagi menjadi empat sub bab. Pada sub bab pertama penulis memaparkan mengenai ILO secara umum kemudian dilanjutkan dengan memaparkan visi misi dan tujuan ILO, serta struktur ILO tersebut. Kemudian di sub bab kedua penulis memaparkan mengenai keadaan ILO di Thailand. Pada sub bab ketiga penulis memaparkan mengenai program-program ILO di Thailand. Selain itu pada sub bab terakhir penulis memaparkan mengenai bentuk pekerja anak berdasarkan Konvensi ILO di Thailand.

A. Gambaran ILO secara umum

International Labour Organization merupakan suatu organisasi Internasional dimana memiliki tugas untuk memajukan pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua orang baik perempuan maupun laki-laki. ILO memiliki tanggung jawab dalam menyusundan mengawasi standar perburuhan internasional. Selain itu ILO juga memiliki tugas membentuk beberapa kebijakan dan program yang memiliki keterkaitan dalam mempromosikan pekerjaan yang layak untuk semua orang. ILO bekerjasama dengan 181 negara anggotanya yang bertujuan untuk memastikan standar ketenagakerjaan apakah layak atau tidak dalam penanganannya.

1. Sejarah ILO

ILO *(International Labor Organization)* atau Organisasi Buruh Internasional adalah sebuah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam menangani, mengawasi serta meningkatkan standar buruh internasional. ILO dibentuk pada tahun 1919 melalui perjanjian Versailles yang mengakhiri perang dunia pertama untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian yang universal dan abadi hanya dapat dicapai bila didasari pada keadilan sosial.

Para pendiri ILO telah berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi serta memerangi ketidakadilan, penderitaan dan kemiskinan.[1] Konstitusi tersebut dirancang pada pertengahan Januari dan April 1919 oleh Labor Commission yang selanjutnya disusun oleh Peace Conference yang bertempat di Paris kemudian di Versailles. Pada 1944, yaitu sewaktu terjadi krisis internasional kedua, para anggota ILO membangun tujuan-tujuan ini dengan menerapkan Deklarasi Philadelphia, yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan hak asasi manusia (HAM) dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa "kemiskinan akan mengancam kesejahteraan di mana-mana".

Pada 1946, ILO menjadi lembaga spesialis pertama di bawah PBB yang baru saja terbentuk. Saat peringatan hari jadinya yang ke 50 di

[1] *Sekilas Tentang ILO* http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_098256/lang--en/index.htm diakses pada tanggal 1 Maret 2015

tahun 1969, ILO menerima Hadiah Nobel Perdamaian.Besarnya peningkatan jumlah negara yang bergabung dengan ILO selama beberapa dasawarsa setelah masa Perang Dunia ke-II telah membawa banyak perubahan. Organisasi ini meluncurkan programprogram bantuan teknis untuk meningkatkan keahlian dan memberikan bantuan kepada pemerintah, pekerja dan pengusaha di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang.[2] Di negara-negara seperti Polandia, Cile dan Afrika Selatan, bantuan ILO mengenai hakhak serikat pekerja berhasil membantu perjuangan mereka dalam memperoleh demokrasi dan kebebasan.

Tahun penting lainnya untuk ILO adalah tahun 1998, di mana para delegasi yang menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference) mengadopsi Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja. Prinsip dan hak ini adalah hak atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama serta penghapusan pekerjaan untuk anak, kerja paksa dan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.Jaminan atas prinsip-prinsip dan hakhak mendasar di tempat kerja, berdasarkan Deklarasi ini, merupakan hal penting karena jaminan ini memungkinkan masyarakat "untuk menuntut secara bebas dan atas dasar kesetaraan peluang, bagian mereka yang adil atas kekayaan yang ikut mereka hasilkan dan untuk menggali potensi mereka sepenuhnya sebagai manusia".

[2] *Origins and history* http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm diakses pada tanggal 1 Maret 2015

ILO dibentuk oleh komisi yang diketuai oleh Samuel Gompers, ketua American Federation of Labor (AFL) di Amerika Serikat, dan diprakarsai oleh sembilan negara yaitu : Belgia, Kuba, Republik Ceko, Perancis, Italia, Jepang, Polandia, Inggris dan Amerika Serikat.[3] Konferensi tersebut menghasilkan dua keputusan, yaitu mengenai larangan pengunaan Phosphorus di perusahaan korek api dan mengatur pekerjaan-pekerjaan wanita pada malam hari. Saat ini, ILO sudah beranggotakan 181 anggota. Markas besar ILO berlokasi di Genewa, Swiss.

ILO (International Labour Organization) merupakan badan suatu organisasi tertua yang menjadi bagian dari PBB karena ILO berdiri sebelum pembentukan PBB yang pada waktu itu masih bernama LBB. ILO mempunyai bidang kajian dan bergerak dalam bidang :[4]

a) Merumuskan kebijaksanaan dan program internasional untuk membantu meningkatkan kondisi kerja dan kondisi hidup, memperkuat kesempatan kerja dan memajukan hak-hak asasi manusia.

b) Menciptakan standar-standar perburuhan internasional untuk dijadikan pedoman bagi para pengusaha nasional dalam melaksanakan kebijakannya.

[3] Origins and History http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm diakses tanggal 1 februari 2015

[4] Elimination of Child Labour (IPEC) http://ilo.org/ipec/programme/lang--en/index.htm diakses pada tanggal 1 Maret 2015

c) Memperluas program kerjasama teknik internasional yang luas untuk membantu pemerintah dalam membuat kebijakan..

ILO memiliki model perwakilan triparti dimana model tripartit merupakan sebuah bentuk perwakilan dimana negara anggota ILO mengirimkan tiga perwakilan yaitu perwakilan pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh. Model ini bertujuan agar seluruh komponen dapat menyampaikan aspirasinya dalam memperkuat kebijakan dan program-program ILO.

2. Tujuan dan Visi Misi ILO

ILO merupakan organisasi internasional yang berupaya untuk melindungi hak-hak buruh, meningkatkan peluang kerja, serta berupaya meningkatkan perlindungan sosial dan memperkuat pembahasan mengenai isu-isu ketenagakerjaan. ILO berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara mengorganisasikan hak-hak buruh, hal ini mengingat bahwa kelangsungan hidup buruh akan menentukan tingkat kesejahteraan.

Tujuan utama ILO adalah meningkatkan kesempatan kepada pria dan wanita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, produktivitas

kerja dalam kemerdekaan, kekayaan, keamanan, dan martabat kemanusiaan.[5]

Saat ini, ILO berupaya untuk mempromosikan pekerjaan yang layak dan memperhatikan kondisi pekerjaan dalam perdamaian abadi, kesejahteraan dan kemajuan.ILO memiliki visi bahwa ILO adalah meningkatkan keadilan sosial bagi masyarakat di seluruh dunia, khususnya kaum pekerja. Sedangkan misi dari ILO itu sendiri yaitu Mempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip serta hak-hak mendasar di tempat kerja yang dimaksud disini yaitu menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.[6] Meningkatkan cakupan dan keefektifan perlindungan sosial dan memperkuat asas tripartit dan dialog sosial.

Untuk mewujudkan visinya, langkah strategis yang dilakukan ILO diantaranya: mempromosikan dan menyadari akan pentingnya standar dan prinsip-prinsip yang fundamental mengenai hak-hak buruh, membuka kesempatan yang lebih besar untuk pria dan wanita demi mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak, mempertinggi pembaharuan dan efektivitas perlindungan sosial untuk semua, memperkuat lembaga tripartit serta melakukan dialog sosial.

---

[5] Sekilas Tentang ILO http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_098256/lang--en/index.htm diakses pada tanggal 1 Maret 2015

[6] *Ibid*

3. Tugas *International Labour Organization*

Konferensi Perburuhan Internasional (International Labor Conference) yang digelar setiap tahun merupakan forum internasional untuk mendiskusikan problem sosial dan perburuhan di seluruh dunia, merumuskan peraturan standar perburuhan dan garis kebijakan umum ILO. Tiap dua tahun, Konferensi Perburuhan Internasional mengadopsi anggaran dan program kerja ILO yang dibiayai oleh iuran negara-negara anggota ILO. Setiap negara anggota ILO diwajibkan mengirim delegasi ke Konferensi (dua wakil pemerintah, dua wakil pengusaha, dan seorang wakil pekerja). Semua wakil memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam diskusi maupun dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara. ILO adalah satu-satunya organisasi di mana pengusaha dan buruh/pekerja dua pihak yang menjadi "partner sosial" dalam proses ekonomi- duduk sejajar dan berpartisipasi dengan pihak pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program.

ILO mendorong pemberlakuan metode tripartite di setiap negara anggota dan mendorong terjalinnnya "dialog sosial", di mana serikat buruh/pekerja dan asosiasi pengusaha sama-sama berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam lingkup sosial dan ekonomi. Selama periode antara satu Konferensi ke Konferensi berikutnya, ILO dipimpin oleh sebuah badan bernama Governing Body yang memiliki 56 anggota (terdiri dari 28 wakil pemerintah, 14 wakil pengusaha, dan 14 wakil buruh/pekerja).

Markas ILO atau International Labor Office berlokasi di Jenewa, Swiss. Meski demikian, sistem administrasi dan manajemen ILO dijalankan secara terdesentralisasi melalui kantor regional dan kantor cabang di lebih dari 40 negara. Pengembangan sektor perburuhan dan sosial yang terkait dengan isu-isu ekonomi khusus dibahas dalam pertemuan sektoral bipartit dan tripartite.Sebuah komite pakar menyiapkan rancangan panduan/materi pelatihan keahlian, pelatihan peningkatan manajerial, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan perburuhan, dan isu-isu pekerja anak dan perempuan. Pertemuan regional juga digelar untuk mendiskusikan hal-hal yang berkembang di wilayah tersebut.

ILO memiliki hubungan konsultatif tetap dengan empat organisasi serikat perburuhan internasional yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ILO. Organisasi tersebut adalah;

a) *International Confederation of Free Trade Unions* (ICFTU),
b) *World Confederation of Labor* (WCL)
c) *World Federation of Trade Union* (WFTU)
d) *Organization of African Trade Union Unity* (OATUU)

4. Fungsi *International Labour Organization*

Tujuan didirikannya ILO adalah untuk meningkatkan keadilan sosial bagi masyarakat di seluruh dunia, khususnya kaum pekerja. Konstitusi lLO dinyatakan bahwa perdamaian abadi hanya mungkin tercipta atas dasar keadilan sosial. Syarat-syarat kerja masih mencerminkan

ketidakadiIan dan selama hal tersebut masih terjadi, maka berbagai goncangan yang terjadi akan mengancaml keserasian dan ketentraman hidup masih akan terus terjadi. 4 Kunci Sasaran ILO Dalam Mencapai Tujuan:

a) Merumuskan kebijaksanaan dan program internasional untuk memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja;
b) Menyusun standar ketenagakerjaan Intenasional untuk dijadikan pedoman bagi negara anggota dalam membuat dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan khususnya dalam membuat peraturan perundangan ketenagakerjaan.
c) Melakukan perbaikan syarat-syarat kerja dan norma kerja serta upaya mengatasi masalah pengangguran.

Tujuan-tujuan tersebut dicapai dengan cara:

a. Memformulasikan berbagai kebijakan dan program-program internasional untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia, meningkatkan kondisi kerja dan memperluas kesempatan kerja.
b. Menciptakan standar internasional ketenagakerjaan didukung dengan sistem unik untuk mengawasi pelaksanaan mereka yang berfungsi sebagai petunjuk kewenangan internasional dalam melaksanakankebijakan kedalam pelaksanaannya.
c. Program kerja teknis intensif yang diformulasikan dan dilaksanakan melalui kemitraan aktif dan konstituen untuk

membantu negara-negara melaksanakan kebijakan tersebut dengan efektif.

d. Pelatihan pendidikan, penelitian dan penertiban publikasi untuk membantu upaya-upaya tersebut

ILO adalah salah satu lembaga organisasi Internasional yang dibentuk oleh PBB dengan tujuan untuk menangani berbagai macam kasus yang menimpa kaum buruh Internasional baik orang dewasa maupun anak-anak. Dalam hal ini ILO memiliki standar pekerjaan yang layak dimana hal tersebut dilandaskan berdasarkan tujuan dasar ILO dimana sebuah pekerjaan yang layak harus :

i. Menciptakan lebih banyak dan lebih baik kesempatan kerja
ii. .melindungi dan menghormati hak-hak pekerja secara hukum
iii. Membangun dan mengembangkan sistem jaminan sosial
iv. Mempromosikan dialog sosial antara pengusaha dan serikat pekerja

5. Peran *International Labour Organization*

Pada 2004, peran ILO dalam mempromosikan strategi untuk menciptakan globalisasi yang adil didukung oleh laporan Komisi Dunia tentang Dimensi Sosial dari Globalisasi. Faktor pendorong yang mendorong pekerjaan yang layak melibatkan ILO, untuk mengintegrasikan apa yang dilakukan di tingkat internasional, regional, nasional maupun lokal.

Dalam mengundang pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun peraturan tenaga kerja, mengawasi pelaksanaannya, meningkatkan kesadaran, serta menyusun kebijakan serta merencanakan program, ILO ingin memastikan bahwa upaya-upayanya ini didasari pada kebutuhan para perempuan dan laki-laki yang bekerja. ILO bekerja secara aktif dengan PBB dan lembaga-lembaga multilateral lainnya dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung terciptanya peluang kerja yang layak sebagai titik penting dari upaya untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan.

6. Struktur International Labour Organization

Struktur organisasi ILO terdir 3 (tiga) badan, yaitu:

a) Sidang Umum atau Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference atau ILC), merupakan forum pleno ILO yang mempunyai kekuasan tertinggi dalam memutuskan semua aktivitas ILO.

b) Badan Pengurus atau Governing Body, merupakan Sidang Badan Pimpinan yang diselenggarakan tiga kali dalam setahun bertempat di Kantor Pusat ILO di Jenewa. Governing Body adalah badan pengambil keputusan ILO yang mempunyai tugas utama memutuskan kebijakan, menetapkan program dan anggaran organisasi, menyusun acara ILO dan lain sebagainya.

c) Kantor Perburuhan Internasional, merupakan sekretariat permanen ILO.

B. *International Labour Organization* di Thailand

Thailand adalah salah satu anggota pendiri ILO. Sebuah kantor penghubung ILO di Thailand dibuka pada tahun 1961 dan pada tahun 1966 Kantor Regional ILO di Asia dan Pasifik dipindahkan dari Colombo ke Bangkok. Pekerjaan ILO di Thailand, (negara berpenghasilan menengah), bertahun-tahun telah berorientasi terhadap isu-isu hak (khususnya, kebebasan berserikat dan perundingan bersama, diskriminasi, pekerja anak dan perdagangan, hak-hak buruh migran) daripada kerja yang lebih luas dan isu-isu pembangunan.[7]

Bidang prioritas kerja ILO meliputi:

a. Perluasan akses ke layanan sosial dan perlindungan sosial. Ini termasuk memperluas dan meningkatkan cakupan, ketentuan dan tata jaminan sosial; membantu pemerintah dengan langkah-langkah yang berkaitan dengan muncul isu-isu kesehatan dan keselamatan kerja, memperluas perlindungan yang memadai bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja migran dan mereka yang berada di perekonomian informal;

[7] Thailand http://ilo.org/asia/countries/thailand/lang--en/index.htm diakses pada tanggal 2 Maret 2015

b. Penegakan yang lebih baik dari pengawasan ketenagakerjaan. Ini mencakup kondisi kerja dan perlindungan hukum bagi pekerja tanpa hubungan kerja yang jelas;
c. Penguatan kapasitas kelembagaan mitra sosial yang berkaitan dengan standar perburuhan inti. Ini termasuk dukungan untuk ratifikasi konvensi inti tentang kebebasan berserikat dan berunding bersama (C.87 dan C.98), dan bantuan dengan revisi Undang-Undang Hubungan Perburuhan (1975).

International Labour Organization di Thailand memiliki tujuan menghapuskan pekerja anak di wilayah Thailand bagian Selatan. Hal tersebut dikarenakan wilayah Thailand selatan memiliki angka pekerja anak yang lebih dominan dibandingkan wilayah lainnya. ILO sebagai lembaga internasional yang memiliki target penghapusan pekerja anak tertarik menangani kasus ini dikarenakan selain pekerja anak di Thailand sendiri terdapat pekerja anak migran non Thailand yang masuk dan bekerja dalam sektor industri perikanan.

Dalam hal ini ILO berpartisipasi dalam sebuah proyek yang memiliki tujuan untuk menghapuskan pekerja anak di industri udang dan industri pengolahan hasil laut. Salah satu program yang dijalankan ILO yaitu program IPEC (International Programme on The Elimination of Child Labour) dimana program ini memiliki tujuan mengatasi pendidikan sebagai sarana untuk memerangi pekerja anak di Thailand. Tujuan dari IPEC yaitu memfasilitasi dan mempromosikan respon efektif terhadap

anak di seluruh dunia termasuk Thailand. Program lain selain IPEC untuk mengurangi pekerja anak di Thailand yaitu

C. Program ILO di Thailand

Dalam melaksanakan tugasnya ILO memiliki beberapa program yang bertujuan untuk mengurangi pekerja anak di Thailand salah satu program yang telah dilakukan ILO antara lain :

1. GLP (*Good Labour Practices)*

Good Labour Practices (GLP) adalah program peningkatan industri perikanan yang komprehensif yang menggabungkan pembentukan pedoman kerja industri dengan program pelatihan praktek kerja yang mendukung. Dalam hal ini program GLP mendapat perhatian khusus terutama pada pekerja anak dan kerja paksa.

Program *Good Labour Practices* (GLP) dimulai dan dikembangkan melalui upaya kolaborasi antara Departemen Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan (DLPW), Departemen Perikanan (DOF) dan anggota industri sebagai program industri perikanan yang komprehensif.Pekerjaan telah secara teknis didukung oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) melalui Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) di Thailand.Serikat Pekerja dan kelompok masyarakat sipil di Thailand juga telah menjadi

bagian dari pengembangan program.[8]Mereka memiliki peran penting untuk bermain dalam memeriksa bahwa program ini memiliki dampak nyata pada kehidupan para pekerja dan bahwa program mendorong partisipasi dari pekerja.

Program GLP adalah kombinasi dari berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman stakeholder dan prinsip-prinsip praktek kerja yang baik melalui pengembangan serangkaian kepatuhan tenaga kerja industri tertentu dan praktek-praktek yang baik pedoman untuk kapal nelayan, peternakan aquamarine, tempat kerja pengolahan primer dan pengolahan atau kemasan pabrik.

Penerapan pedoman GLP dipromosikan melalui peningkatan kapasitas dari dorongan permintaan dan program pelatihan.Pedoman GLP bertujuan mempromosikan undang-undang yang ada dan peraturan tentang pekerja anak, kerja paksa dan kondisi kerja dan mempromosikan umumnya budaya kepatuhan dalam industri.Program tersebut mencakup hak-hak buruh yang mendasar tetapi juga menangani masalah-masalah seperti kompensasi, perekrutan dan keselamatan kerja dan kesehatan.

Pedoman GLP memberikan perhatian khusus untuk mengatasi pekerja anak yang berbahaya dan, mengingat tingginya tingkat

[8]*" Good Labour Practices (GLP) programme addressing child labour and forced labour in Thai fisheries industry"* http://www.ilo.org/asia/WCMS_221455/lang--en/index.htm diakses pada tanggal 2 Maret 2015

penggunaan buruh migran di industri, juga hak-hak dan kesejahteraan pekerja migran. Program GLP bertujuan untuk memastikan bahwa semua pelaku dalam udang dan seafood pengolahan dan pasokan ikan rantai telah meningkatkan kesadaran standar perburuhan dan hukum mengenai kondisi kerja dan dilengkapi untuk menegakkan dan mempromosikan praktik ketenagakerjaan yang tepat tidak hanya di perusahaan mereka, tetapi juga hilir pasokan mereka rantai.

2. IPEC *(International Programme on the Elimination of Child Labour)*

Pada tahun 1992 Thailand adalah salah satu negara pertama yang bergabung dalam IPEC. Komite pengarah nasional dibantu dengan pemerintah mendirikan IPEC pada tahun 1994 dengan tujuan untuk merespon pekerja anak dan melakukan pengawasan tenaga kerja dan kesejahteraan sosial. IPEC berkontribusi penting dalam pengembangan setiap kebijakan di Thailand termasuk penegakan UU prostitusi (1996), UU perlindungan buruh tahun 1998 (minimal usia untuk bekerja 13 sampai 15 tahun), UU pendidikan (1999).

IPEC merupakan salah satu program ILO untuk meminimalisir pekerja anak di Thailand. IPEC memiliki tujuan mengatasi pendidikan sebagai sarana untuk memerangi pekerja anak di Thailand. Tujuan dari IPEC yaitu memfasilitasi dan mempromosikan respon efektif terhadap anak di seluruh dunia termasuk Thailand. Dalam hal ini IPEC telah

melakukan beberapa usaha untuk menangani kasus pekerja anak di dunia salah satunya yaitu meningkatkan pengetahuan penjangkauan untuk mempercepat pengumpulan data, analisi, pelatihan dan sosialisasi dalam hal pengumpulan data tenaga kerja anak di dunia.[9]

IPEC memiliki tujuan tersendiri dalam menjalankan program mengurangi pekerja anak dan pekerja paksa di industri udang dan makanan laut antara lain: Melakukan survei tingkat perusahaan untuk mengumpulkan informasi tentang hubungan bisnis dan praktek di udang dan industri makanan laut untuk membantu menginformasikan perbaikan kebijakan dan praktek instansi pemerintah, asosiasi produsen dan kelompok kerja yang berkaitan dengan mengatasi kondisi kerja.

Dalam hal ini di Thailand terdapat beberapa wilayah yang menjadi tujuan ILO untuk memberantas pekerja anak di Thailand, wilayah tersebut antara lain Samut Sakhon, Surat Thani, Songkhla dan Nakhon Si Thammara yang mana wilayah tersebut terletak di bagian selatan Thailand. Berikut penjelasan mengenai keradaan pekerja anak dalam perusahaan atau sektor makanan laut di beberapa wilayah Thailand Selatan :

[9]About the International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)http://ilo.org/ipec/programme/lang--en/index.htm diakses pada tanggal 2 Maret 2015

a. Samut Sakhon

Survei menemukan bahwa lebih dari setengah dari industri ini terdiri dariusaha mikro (kurang dari 6 pekerja) dan usaha kecil, dengantidak lebih dari 25 pekerja. Terkecil ini hanya rata-rata sekitar 4 pekerja, yang bekerja di kecil, pengolahan rumahan itu sebagian besar dari "gudang" umumnya sumber bahan bakunya dari pasar sentral, terlibat dalam pengolahan primer seperti mengupas atau membersihkan bagian tengah dari udang, dan hampir tanpa kecuali menjual diprosesproduk di pasar lokal untuk konsumsi dalam negeri. Kapasitas operasi Mereka berkisar 0,6-0,8 ton udang per hari.Untuk usaha kecil, ini naik ke kisaran 0,7-1 ton udang per hari.

b. Nakhon Si Thammara dan Surat Thani

Di Nakhon Si Thammarat dan Songkhla, jumlah anak laki-laki bekerja di luar sekolah pada saat survei lebih besar dari jumlah perempuan yang bekerja. Di Samut Sakhon dan Surat Thani, jumlah perempuan yang bekerja di usia muda (5-12 tahun) lebih besar dari jumlah anak laki-laki yang bekerja di rentang usia yang sama.Selain pekerjaan, sebagian besar anak perempuan yang bekerja juga harus melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan anak laki-laki jauh lebih sedikit diharapkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga.

Alasan mengapa anak-anak di Nakhon Si Thammarat dan Songkhla Provinsi putus sekolah antara lain akibat ketidak inginan anak-anak untuk belajar, kondisi perekonomian keluarga dimana anak-anak diharuskan untuk bekerja untuk mendapatkan penghasilan, tidak memiliki uang untuk melanjutkan studi,selain itu mereka harus membantu bisnis keluarga dan kurangnya dukungan orang tua akan pendidikan yang lebih baik.[10]

Dalam menanggulangi kasus pekerja anak di wilayah Thailand bagian selatan ini ILO mengupayakan beberapa langkah dan tindakan seperti membuat pelatihan kerja bagi para masyarakat sekitar industri dan juga para pekerja di industri perikanan agar mereka memiliki kemampuan dan terampil dalam bekerja. Selain itu, anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut baik bekerja maupun sekedar menemani orang tuanya untuk bekerja diberikan bekal pendidikan dan ilmu secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya sepersen pun. Hal tersebut hanya dapat menarik perhatian beberapa orang tua untuk memberikan peluang anak dalam memperoleh pendidikan, disamping itu beberapa orang tua lain tidak memperdulikan program tersebut.[11]

---

[10] *"Baseline Surveys on Child Labor in Selected Areas in Thailand",* *http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro bangkok/documents/publication/wcms_222568.pdf*)diakses pada tanggal 2 Maret 2015

[11] Tackling Child Labour in Southern Thailand, http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-i-b.pdf diakses pada tanggal 10 Maret 2015

D. Bentuk pekerja anak berdasarkan Konvensi ILO di Thailand

Bentuk-bentuk terburuk pekerja anak dijelaskan dalam pasal 3 yang terdapat dalam Konvensi ILO No. 182. Konvensi tersebut menyatakan bahwa bentuk-bentuk pekerja anak terburuk meliputi:

1) Segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, dan kerja paksa atau wajib, termasuk perekrutan paksa atau wajib anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata;
2) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk melakukan pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
3) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
4) pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan, kemungkinan akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Buruh yang membahayakan fisik, mental atau moral kesejahteraan anak, baik karena sifatnya atau karena kondisinya tersebut dikenal sebagai "pekerjaan berbahaya". Pedoman bagi pemerintah dalam beberapa kegiatan pekerja anak yang berbahaya disertai dalam Rekomendasi ILO No. 190 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 1999:

Pertimbangan dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang terdapat dalam pasal 3 (d) dari Konvensi tersebut juga diberikan antara lain untuk:

1) Pekerjaan yang mengekspos anak-anak untuk kekerasan fisik, psikologis atau seksual;
2) Bekerja di bawah tanah, di bawah air, pada ketinggian yang berbahaya atau di ruang terbatas;
3) Bekerja dengan mesin berbahaya, perlengkapan dan peralatan, atau yang melibatkan penanganan manual atau transportasi beban berat;
4) Bekerja di lingkungan yang tidak sehat yang dapat, misalnya, mengekspos anak-anak untuk bahan berbahaya, agen atau proses, atau suhu, tingkat kebisingan, getaran atau merusak kesehatan mereka;
5) Bekerja di bawah kondisi yang sangat sulit seperti bekerja selama berjam-jam atau pada malam hari atau bekerja di mana anak tanpa alasan dikurung di tempat majikan.

Semua hal tersebut telah dijelaskan dalam konvensi ILO no 182 dan juga konvensi ILO No. 190.Dalam konvensi tersebut disebutkan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap pekerja anak terburuk harus segera dihapuskan.[12]

[12] Eliminating The Worse Form of Child Labour in Thailand, http://www.ipu.org/PDF/publications/childlabour_en.pdf diakses pada tanggal 18 Maret 2015